

# Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Windi Adia Atirta<sup>1</sup> Herman<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
windiadiaatirta@student.uir.ac.id herman@soc.uir.ac.id

Received : August 14, 2024;

Accepted : 15 August 2024

## Abstract

*Accountability is an obligation to provide accountability or answer and explain the performance and actions of a legal entity or the head of an organization, to the party authorized to receive information or accountability. Corporate Social Responsibility is a company's commitment to contribute to sustainable economic development by taking into account corporate social responsibility and emphasizing on the balance between attention to economic, social and environmental aspects. This study aims to analyze and explain the Corporate Social Responsibility Accountability of PT Riau Investment Development (PIR) in Pematang Benteng Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is descriptive qualitative. This research has ten indicators, namely Policies and Procedures, Reporting and Monitoring, Accountability and Delegation, Transparency and Openness, Performance Evaluation, Rewards and Consequences, Participation, Independent Supervision, Internal Control, Training and Awareness.*

**keyword:** *Accountability, Corporate Social Responsibility.*

## Abstrak

Menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki sepuluh indikator, yaitu Kebijakan dan Prosedur, Pelaporan dan Pemantauan, Pertanggungjawaban dan Delegasi, Transparan dan Keterbukaan, Evaluasi Kinerja, Penghargaan dan Konsekuensi, Partisipasi, Pengawasan Independen, Pengendalian Internal, Pelatihan dan Kesadaran. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, pada pasal 9 berbunyi:

1. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksan Tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
4. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Dalam hal ini perusahaan harus melaksanakan akuntabilitas terhadap program-program yang telah direncanakannya dan bersifat wajib bagi perusahaan agar berdampak kepada masyarakat. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya, akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya.

Salah satu perusahaan yang telah menjalankan Tanggung jawab sosial perusahaan adalah PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR). PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17/IUP/545-02/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi dengan luas wilayah 1.750 hektar, dengan kode wilayah BB065-INHU. Nomor persetujuan AMDAL 398 tahun 2012. Secara administratif wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Pengembangan Investasi Riau berada di wilayah Lubuk Banko Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dimana PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ini mempunyai program-program yang telah direncanakan dan sebagian sudah terlaksana.

Terdapat beberapa program-program pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), program-program tersebut antara lain;

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sosial dan Budaya
4. Dan Infrastruktur.

PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), sudah melaksanakan program-program Tanggung jawab sosial perusahaannya. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum teralisasi dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan fenomena terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan dan pemantuan dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
2. Kurangnya evaluasi dan pengawasan dalam mengawasi tindakan dan kinerja hal ini dapat menyebabkan konflik dan manipulasi data.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Menurut Hidayat dkk. (2022), secara umum merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas bisa juga di katakan menjadi bentuk usaha yang mempunyai keterkaitan pada macam-macam pengaturan kebijakan mencapai target terhadap organisasi, administrasi mempunyai peran yang sangat krusial untuk segala kegiatan yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Administrasi memiliki peran sangat penting agar suatu perusahaan bisa tetap berdisiri dan lebih berkembang.

### **Konsep Organisasi**

Menurut Malawat (2022), menyatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Siagian, (dalam Andry, 2020), Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat, dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

### **Konsep Manajemen**

Kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. (Krisnandi dkk, 2019).

Manajemen merupakan bentuk penting bagi kehidupan manusia karena dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan spesialisasi pekerjaan serta berkembangnya skala operasi yang ada di era sekarang ini. Ada alasan utama diperlukan manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efektif dan efisien. (Firmansyah & Mahardika, 2018).

### **Konsep Kebijakan Publik**

Anggra (2014) dalam (Dewi, 2022) mendefinsikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan.

Anderson (1984) dalam (Igirisa, 2022), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku

untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/policy menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

### **Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Herman (2019), menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan sumbangsih hasil usahanya kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara umum. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki peran masing-masing pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Menurut Wedayanti (2019), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah penganut prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.

### **Konsep Akuntabilitas**

Menurut Endang (2017), Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Krina, (2013) dalam (Edowai et al, 2021), menjelaskan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Lebih lanjut Krina juga menyebutkan bahwa akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system).

### **Metode**

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya, yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya.

Metode penelitian deskriptif ini menjelaskan, menganalisis dan mengklarifikasi serta menyelidiki dengan teknik survey, wawancara angket, observasi atau dengan teknik test: Studi kasus, studi Komparatif, studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi kolaboratif atau operasional.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan salah satu teknik sampling dengan pendekatan non Probability Sampling, yang mana *Purposive sampling* ini memilih anggota

sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subyektif) yang ditunjuk secara langsung seperti sampelnya merupakan seseorang/individu maupun kelompok yang mengerti bidang tertentu dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Tanggapan Informan Tentang Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

### **Kebijakan dan Prosedur**

Kebijakan dan Prosedur yaitu mengatur tindakan dan keputusan, serta menentukan harapan dan standar yang harus dipatuhi.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) ini dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dan juga sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari Perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Dana kegiatan yang diberikan sesuai dengan pendapatan pertahun perusahaan. Jadi, tidak menentu dan tidak bisa dipastikan berapa persen dana yang akan dikeluarkan setiap tahunnya”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **masyarakat Desa Pematang Benteng**, pada Jum'at, 21 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Kebijakan dan Prosedur, untuk kebijakan dan prosedur dalam regulasi maupun kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kami kurang mengetahui hal tersebut”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan mengetahui tentang Kebijakan dan Prosedur mengenai kegiatan atau program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perusahaan sudah melaksanakan program sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Namun kegiatan atau Program yang Perusahaan laksanakan belum berjalan dengan maksimal karena masih banyak kegiatan atau program yang tidak terealisasikan dengan baik.

### **Pelaporan dan Pemantauan**

Pelaporan dan Pemantauan yaitu sebagai mekanisme untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi tentang tindakan dan kinerja.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pelaporan dan Pemantauan, Tentu pelaporan ada. Pelaporan ini akan berguna bagi kami agar anggaran dana yang kami berikan tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu laporan hasil kegiatan juga harus diberikan oleh pihak desa agar kami mengetahui bahwa benar kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)*

dilakukan dan nyata hasilnya. Selain itu kami juga melaporkan kegoatan ini kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, agar dikemudian hari jika ada pertanyaan kami bisa menjawabnya dan memiliki laporannya.

Pemantauan yang kami lakukan tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali atau ketika ada hal yang mendesar di lapangan saat kegiatan dilakukan”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pelaporan dan Pemantauan, pelaporan setiap kegiatan yang perusahaan lakukan tentu mereka melaporkannya kepada kami, tetapi jika dilihat dari website Forum CSR Provinsi Riau PT Pengembangan Investasi Riau memang benar anggota dari Forum CSR Provinsi Riau. Tetapi, untuk kegiatan atau realisasi kegiatan yang mereka lakukan belum ada atau belum melaporkannya kepada kami, bisa di lihat dari website tersebut”.*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan belum melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka kepada pihak Forum CSR Provinsi Riau dan tidak adanya Pemantauan terhadap kegiatan yang Perusahaan laksanakan.

### **Pertanggungjawaban dan Delegasi**

Perusahaan belum melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka kepada pihak Forum CSR Provinsi Riau dan tidak adanya Pemantauan terhadap kegiatan yang Perusahaan laksanakan.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pertanggungjawaban dan Delegasi, tanggungjawab yang kami berikan selain dalam bentuk biaya kami juga memantau kegiatan yang dijalankan. Untuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang untuk kegiatan itu saya berikan kepada Kepala Desa bagaimana baiknya agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar”.*

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pertanggungjawaban dan Delegasi, seharusnya memang kegiatan yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan, bentuk tanggungjawab kami hanya sebatas mengingatkan mereka untuk melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) lakukan. Dengan laporan kegiatan yang mereka berikan itu sebagai bukti bahwa mereka benar melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pelimpahan wewenang untuk saat ini belum ada, tetapi jika Ketua Forum CSR tidak bisa menghadiri suatu kegiatan atau berhalangan maka saya sebagai Sekretaris atau Wakil Ketua yang akan menggantikan beliau”.*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab atas kegiatan pada Desa Pematang Benteng saja untuk Tanggungjawab mengenai Pelaporan kegiatan kepada Forum CSR Provinsi Riau itu tidak ada.

### **Transparansi dan Keterbukaan**

Transparansi atau Keterbukaan yaitu memastikan akses terhadap informasi relevan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat memahami tindakan dan keputusan yang diambil.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Transparansi dan Keterbukaan, Kami tidak pernah menutupi kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), jika masyarakat ingin mengetahui apa saja kegiatannya dan rencana anggaran kegiatannya akan kami berikan, tetapi jika rencana anggaran kegiatan tidak sesuai dengan realisasi anggaran kegiatannya diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau membuat masalah”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Transparansi dan Keterbukaan, untuk informasi yang masyarakat atau mahasiswa ingin ketahui bisa melalui website kami yaitu Forum CSR Provinsi Riau. Disana kalian bisa melihat anggota Forum CSR siapa saja, Perusahaan apa saja yang sudah melakukan atau merealisasikan kegiatan mereka disana bisa kalian lihat. Namun, jika ingin informasi yang lebih detail kalian bisa bertanya kepada Perusahaan yang bersangkutan”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan sudah transparan dalam memberikan data mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan asalkan informasi yang mereka berikan tidak disalahgunakan.

### **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi Kinerja yaitu bentuk proses untuk menilai hasil dan dampak dari tindakan dan keputusan yang diambil.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Evaluasi Kinerja, Evaluasi yang kita dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Untuk evaluasi kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dilakukan seminggu sekali agar progres dapat terlihat, nanti Kepala Desa akan memberikan laporan tentang progres kegiatan dan kami akan melihatnya, jika tidak sesuai dengan prosedur maka akan kami atasi atau mencari solusi yang tepat”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Evaluasi Kinerja, evaluasi kinerja untuk saat ini sedang kami tingkatkan, karena Forum ini baru terbentuk dan kami masih banyak hal yang harus diperbaiki baik itu dari dalam Forum CSR sendiri maupun bagi pelaporan dari Perusahaan, sedang kami tingkatkan atau evaluasi. Hal ini dilakukan agar Forum CSR ini bisa lebih merangkul setiap Perusahaan yang ada di Provinsi Riau dan agar masyarakat juga dapat mendapatkan dampak yang positif dari Perusahaan”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Forum CSR belum melakukan Evaluasi Kinerja kepada Perusahaan dan Perusahaan hanya melakukan evaluasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Kepala Desa saja.

## Penghargaan dan Konsekuensi

Penghargaan dan Konsekuensi yaitu menghubungkan akuntabilitas dengan insentif positif untuk tindakan yang sesuai dan konsekuensi negatif untuk tindakan tidak sesuai.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Penghargaan dan Konsekuensi, setiap hari-hari nasional atau hari-hari penting, pasti ada pemberian penghargaan kepada karyawan, mulai dari karyawan teladan, karyawan terbaik, dan kategori-kategori lainnya. Penghargaan yang diberikan berbentuk piagam dan hadiah yang lainnya. Namun, penghargaan dari Desa atau Forum sampai saat ini belum ada”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Penghargaan dan Konsekuensi, untuk penghargaan sudah kami berikan kepada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) seperti penghargaan dari Gubernur untuk PT RAPP. Tetapi, untuk PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) belum ada pemberian penghargaan. Untuk konsekuensi atau sanksi yang diberikan itu kami tidak bisa melakukannya, karena itu tugasnya pemerintahan kami disini hanya sebagai fasilitator atau menjembatani antara Pemerintahan dan Perusahaan yang berada di Provinsi Riau”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak menerima Penghargaan apapun dan Konsekuensi yang diterima atau sanksi yang diberikan oleh Forum CSR kepada Perusahaan belum ada.

## Partisipasi

Partisipasi yaitu pihak yang berkepentingan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, seperti masyarakat, karyawan atau pelanggan dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Partisipasi, kami berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun desa agar lebih maju lagi. Partisipasi yang kami berikan selain dana juga tenaga, selain itu kami juga ikut mengawasi kegiatan yang desa laksanakan”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Partisipasi, setiap anggota didalam Forum CSR diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun, hal tersebut tergantung bagaimana pihak Perusahaan melakukannya. Perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) memang anggota dari Forum CSR, tetapi untuk partisipasinya dalam Forum CSR itu belum terlihat karena Perusahaan ini belum melaporkan hasil dari realisasi Kegiatan Mereka Kepada Kami”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) sudah melakukan partisipasi tetapi hanya kepada pihak

Desa saja, untuk partisipasi didalam Forum CSR itu belum ada dan Forum juga tidak ikut dalam partisipasi kegiatan yang perusahaan laksanakan.

### **Pengawasan Independen**

Pengawasan Independen yaitu mekanisme independen untuk mengawasi tindakan dan kinerja agar terhindar dari potensi konflik kepentingan atau manipulasi.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pengawasan Independen, kami awasi setiap kegiatan yang sedang dijalankan. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa kami awasi mereka juga melaporkan kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban (lpj) kemudian laporan ini akan kami berikan ke pusat dan akan kami berikan pula kepada pihak yang berwenang (forum)”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pengawasan Independen, untuk pengawasan secara langsung kami tidak melakukannya, karena kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini tergantung bagaimana Perusahaan melakukannya. Selain itu, sanksi yang tegas juga tidak ada, hal ini membuat kami kesulitan dalam memberikan sanksi kepada Perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan mereka”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Independen yang dilakukan oleh pihak Forum CSR kepada Perusahaan itu tidak ada. Dan Perusahaan melakukan pengawasan hanya saat awal kegiatan dilakukan dan saat akhir kegiatan dilakukan.

### **Pengendalian Internal**

Pengendalian Internal yaitu sebagai sistem pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan akurasi laporan dan mencegah penyimpangan.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pengendalian Internal, selain dari laporan yang Kepala Desa berikan saya juga memantau apakah laporan tersebut sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sehingga dana yang kami berikan tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan melindungi nama baik Perusahaan”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pengendalian Internal, keakuratan laporan yang perusahaan berikan kepada kami, kami juga tidak bisa memastikan apakah itu benaran terjadi seperti itu dilapangan atau tidak. Yang kami tahu bahwa Perusahaan sudah melaporkan kegiatannya kepada kami. Tetapi, untuk saat ini Perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) belum memberikan laporan realisasi kegiatannya kepada kami”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Forum CSR belum menerima laporan mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Perusahaan lakukan dan untuk keakuratan laporan kegiatan dari Kepala Desa yang

diberikan kepada PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

### **Pelatihan dan Kesadaran**

Pelatihan dan Kesadaran yaitu kepada individu atau kelompok tentang tanggung jawab mereka dan pentingnya akuntabilitas.

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu **bapak Rudi Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)**, pada Senin, 24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pelatihan dan Kesadaran, untuk karyawan tentu ada masa training yang kami berikan secara teori mereka tentu sudah belajar di sekolah atau universitas, sedangkan untuk bagian lapangan akan kami ajarkan bagaimana cara kerjanya. Karyawan harus sadar akan tanggungjawab yang kami berikan baik itu kegiatan yang kecil maupun kegiatan yang besar, tanggungjawab yang kami berikan tidak boleh di salah gunakan untuk menghindari permasalahan yang akan datang dikemudian hari. Hambatan yang signifikan tidak ada, dan jika ada bisa dibicarakan baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan”*.

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu **ibuk Winda Damelia Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau**, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: *“Pelatihan dan Kesadaran, hal ini tergantung perusahaan masing-masing. Perusahaan harus sadar akan tanggungjawabnya akan masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Tugas kami disini hanya sebagai penghubung antara Pemerintahan dan Perusahaan. Dan seharusnya Perusahaan harus sadar akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu sendiri”*.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya Kesadaran Perusahaan akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mana kegiatan ini sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

### **Kesimpulan**

1. Indikator Kebijakan dan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana karena Perusahaan sudah mengikuti Kebijakan dan Prosedur baik sesuai dengan regulasi maupun sesuai dengan aturan Perusahaan itu sendiri.
2. Indikator Pelaporan dan Pemantauan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana karena PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) belum memberikan laporan realisasi kegiatannya kepada pihak Forum CSR dan Forum CSR belum memantau kegiatan yang Perusahaan laksanakan.
3. Indikator Pertanggungjawaban dan Delegasi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup

terlaksana dapat dilihat bahwa Perusahaan sudah bertanggungjawab atas kegiatan yang mereka laksanakan dan delelagi sudah dilaksanakan dengan baik. Namun Tanggungjawab dalam hal melaporkan kegiatan kepada Forum CSR belum dilakukan.

4. Indikator Transparansi dan Keterbukaan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni Sudah terlaksana karena baik Perusahaan maupun Forum CSR sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
5. Indikator Evaluasi Kinerja Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana karena Perusahaan sudah melakukan evaluasi kinerja baik kepada kegiatan yang mereka laksanakan maupun kepada karyawan didalam perusahaan. Namun, Forum belum melakukan evaluasi kepada Perusahaan.
6. Indikator Penghargaan dan Konsekuensi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana karena Perusahaan belum menerima penghargaan dari pihak manapun dan untuk konsekuensi yang signifikan tidak ada.
7. Indikator Partisipasi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana karena Perusahaan belum melakukan partisipasinya didalam Forum CSR, tetapi partisipasi dalam kegiatan yang mereka laksanakan sudah terlaksana.
8. Indikator Pengawasan Independen Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana karena Forum tidak melakukan pengawasan kepada Perusahaan saat melaksanakan kegiatan yang perusahaan laksanakan dan Perusahaan hanya mengawasi kegiatan yang Perusahaan laksanakan tidak setiap saat.
9. Indikator Pengendalian Internal Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana karena Perusahaan belum memberikan laporan realisasi kegiatan kepada Forum CSR, sehingga Forum CSR tidak mengetahui kegiatan apa yang Perusahaan laksanakan.
10. Indikator Pelatihan dan Kesadaran Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana karena Perusahaan kurang kesadarannya atas akuntabilitas tanggung jawab sosial

perusahaannya, Perusahaan tidak mempunyai kesadaran atau inisiatif untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

11. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Andry, H dan Yussa T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Edowai, Mikael., Herminawaty Abubakar, dan Miah Said. (2021). *AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Endang, E. (2017). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 41-56.
- Firmansyah, A., & Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu*

*Administrasi Publik*, 10(1), 49-58.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS Ecuador)*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar

Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.

- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.

- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP

KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN*

*REALITA*, 1(1), 01-07.

- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091-7100.
- Igirisa, Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik: suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Krisnandi, Herry, dkk. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Univesitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Wedayanti, M. D., Yogia, M. A., Siahaan, A. Y., & Faidati, N. (2019). HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU. *VALUTA*, 5(1), 30-44.